

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberhasilan pembangunan nasional salah satunya ditandai dengan terbentuknya system keuangan yang stabil dan memberikan manfaat bagi semua lapisan masyarakat. Dalam hal ini, lembaga keuangan memainkan peran penting melalui fungsi *intermediary* guna mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan distribusi pendapatan, penentasan kemiskinan, dan stabilitas sistem keuangan. Namun dengan seiring perkembangan industri keuangan sering kali tidak diimbangi dengan akses terhadap layanan keuangan yang memadai. Akses publik terhadap lembaga keuangan di Indonesia masih termasuk dalam kategori *moderate* di banding dengan negara berkembang lainnya. Akses terhadap layanan keuangan adalah permasalahan yang kompleks yang mencakup masyarakat sebagai konsumen dan lembaga keuangan sebagai produsen. Hal ini membutuhkan pendekatan multi dimensi untuk meningkatkan akses terhadap lembaga keuangan (Anwar, *dkk*, 2014)

Inklusi keuangan adalah upaya untuk mendorong sistem keuangan agar dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas sekaligus mengatasi kemiskinan. Inklusi keuangan bertujuan untuk meniadakan segala bentuk hambatan terhadap akses masyarakat

dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan yang didukung dengan infrastruktur yang ada.

Kebijakan keuangan inklusif adalah bentuk pendalaman layanan keuangan yang ditujukan kepada masyarakat pada “*bottom pyramid*” untuk memanfaatkan produk dan jasa keuangan formal seperti sarana menyimpan uang yang aman, transfer, menabung maupun pinjaman dan asuransi. Maka dari itu, inklusi keuangan dapat diartikan sebagai kondisi dimana masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan formal sesuai dengan kebutuhan dan mudah di akses dari sisi persyaratan serta layanan. Hal ini dilakukan tidak saja menyediakan produk dengan cara yang sesuai tapi dikombinasikan dengan aspek (Bank Indonesia, 2014).

Alasan mengapa inklusi keuangan diperukan yaitu yang pertama masyarakat desa khususnya yang berada dipedalaman terbiasa menyimpan asset atau kekayaan dalam bentuk barang simpanan. Dengan alasan itu, menjadi perhatian tersendiri untuk memberi pengetahuan serta pemahaman kepada masyarakat agar sadar berbank sehingga asset yang dimiliki masyarakat dapat digunakan lebih produktif. Perputaran aliran dana akan mendorong keseimbangan pendapatan, yang ujungnya mengarah pada keseimbangan ekonomi. Kedua, inklusi keuangan merupakan salah satu jalan menciptakan keseimbangan sosial. Dengan meminimalisir kesenjangan pendapatan pada masyarakat akan mendorong terwujudnya keseimbangan sosial dimasyarakat. Masyarakat satu dengan yang

lainnya secara tidak langsung bisa saling membantu transfer dana melalui intermediasi perbankan.

Data perbankan di Indonesia mengindikasikan bahwa penyaluran kredit perbankan masih belum optimal khususnya pada sektor UKM. Sejak tahun 1998-2013 tercatat proporsi kredit UKM masih belum mengalami perubahan dengan tingkat pertumbuhan masih dibawah 20%. Sementara itu disisi lain, tingkat penyaluran kredit konsumsi selalu berada diatas pertumbuhan kredit investasi maupun kredit modal kerja (Bank Indonesia, 2014).

Sebagai salah satu alternatif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, UMKM masih terhambat sejumlah persoalan yang ditinjau dari dua faktor. Pertama, faktor internal yaitu lemahnya segi permodalan bagi UMKM, produksi, pemasaran produk, dan sumber daya manusia. Modal biasanya hanya didapatkan dari uang individu yang dimiliki oleh pemilik UMKM itu sendiri. Sedangkan produk serta pemasaran yang dilakukan hanya sebatas pengetahuan yang mereka miliki. Pemasaran hanya dilakukan dari mulut ke mulut sehingga perkembangannya tidak terlalu pesat, kedua faktor eksternal yang berupa masalah yang muncul dari pihak pengembangan dan pembinaan UMKM serta terbatasnya akses masyarakat pada lembaga keuangan (Irmawati, *dkk*, 2013). Dengan keterbatasan akses masyarakat terhadap lembaga keuangan ini memberikan dampak pada permodalan UMKM dimana para pelaku usaha UMKM kesulitan mendapatkan modal dari lembaga keuangan tersebut.

Hal ini juga terjadi pada pelaku usaha atau pedagang yang ada di pasar. Dengan keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan pedagang pasar akan sulit untuk mendapatkan modal usaha.. Sektor perdagangan merupakan salah satu sektor dalam bidang ekonomi yang mendapat perhatian pemerintah sebagai titik berat dalam pengembangan usaha mandiri (Wulandari, 2017). Pasar merupakan salah satu produksi industri perdagangan (Vijayanti, 2016). Menurut jenis transaksinya, pasar dibedakan menjadi pasar tradisional dan pasar moderen. Pasar Tradisional merupakan salah satu program yang dilakukan pemerintah dalam mendorong usaha kecil dan menengah yang ada di masyarakat dapat tumbuh (Endah, 2011).

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang sangat terkenal dengan adat dan kebudayaan yang tinggi serta terkenal dengan identitas tradisional termasuk dalam hal pasar tradisional. Salah satu pasar tradisional yang ada di Yogyakarta adalah pasar yang berada di Kabupaten Sleman yaitu pasar Sentral Gamping.

Pasar Gamping merupakan sebuah pasar tradisional yang cukup besar di Kabupaten Sleman tepatnya di Gamping Kidul Ambarketawang Gamping Sleman Yogyakarta. Pasar Gamping berdiri pada tahun 1995 dengan luas sekitar 1,5 hektar. Pada awalnya, pasar ini berada pada tempat shopping center yang berada di daerah kota Yogyakarta. Menurut sejarah pasar ini sudah ada diperkirakan sejak jaman kerajaan Mataram dan sebelum kerajaan Mataram di bagi menjadi dua kerajaan. Pasar gamping menjadi tempat untuk pembelian/perkulakan berupa

grosir maupun eceran untuk nanti dijual kembali. Pasar Gamping sendiri telah memiliki jumlah pedagang telah mencapai 1045 orang.

Tabel 1.1
Persebaran Pasar di Sektor Barat Kabupaten Sleman

No	Nama Pasar	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah pedagang
1	Pasar Gamping	Gamping	Ambarketawang	1045
2	Pasar Kebonagung	Minggir	Sendangagung	235
3	Pasar Godean	Godean	Sidoagung	1721
4	Pasar Ngino	Seyegan	Margoagung	321
5	Pasar Ngijon	Moyudan	Sumberagung	358
6	Pasar Balangan	Minggir	Sendangrejo	328

Sumber : Dinas Pasar Sleman, 2018.

Pedagang di pasar Gamping sendiri sebagai pelaku sektor usaha kecil seringkali mengalami hambatan dalam perekonomian. Dimana permasalahan ekonomi yang ada memang tidak ada habisnya. Pendapatan yang diperoleh terkadang tidak memenuhi untuk mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari dan mengakibatkan mereka sulit untuk membangun usaha karena modal yang kurang. Keterbatasan keuangan yang sering mengemukakan setiap perbicangan usaha kecil adalah lemahnya bidang keuangan. Banyak para usaha mikro dan kecil tidak leluasa dalam mengembangkan usahanya kerana terkendala dalam permodalan.

Modal memiliki pengaruh yang sangat besar atas keberlangsungan serta geliat ekonomi pasar. Bagi para pedagang pasar, permodalan merupakan unsur yang penting dalam mendukung produksi dan pendapatan guna meningkatkan kesejahteraan. Jika modal tersebut minim maka geliat ekonomi pun akan melemah

dan berdampak pada kesejahteraan ekonomi. Ketika terjadi kendala dalam permodalan atau modal yang kurang banyak pedagang yang mengatasi masalah tersebut dengan meminjam uang pada bank thithil atau yang biasa di sebut rentenir.

Berdasarkan riset dan wawancara langsung yang telah penulis lakukan di lapangan selama tiga hari bahwa 7 dari 12 pedagang, hampir sebagian besar terjebak dalam praktek rentenir. Pedagang yang terjebak dalam praktek rentenir adalah mereka yang berusia limapuluhan tahun keatas. Dan rata-rata pedagang di pasar Gamping memberikan alasan mereka mengapa memilih meminjam uang kepada rentenir di bandingkan lembaga keuangan kerena adanya kenyamanan dan kemudahan dalam transaksinya.

Pengamatan sementara tersebut juga menunjukkan bahwa sebagian dari pedagang di pasar Gamping mengalokasikan pendapatannya dengan cara tidak ditabung di lembaga keuangan. Hal ini yang membuaat penulis berfikir bahwa dana-dana yang dimobilisasi oleh lembaga keuangan formal seperti, koperasi, BMT dan lembaga keuangan lainnya belum digunakan oleh sebagian besar pedagang yang ada di pasar Gamping. Hal ini juga membuktikan bahwa akses lembaga keuangan pada pedagang di pasar Gamping masih kurang sehingga memberikan kesimpulan bahwa inklusi keuangan pedagang juga masih rendah, hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang inklusi keuangan pedagang di pasar Gamping

Ketertarikan penulis, juga didukung oleh penelitian orang lain. Dimana penelitian tersebut dilakukan oleh salah satu mahasiswa Ilmu Ekonomi dengan objek penelitian di pasar tradisional sektor barat Sleman yaitu pasar Gamping, pasar Godean dan Pasar Ngijon yang bertujuan untuk menganalisis faktor - faktor yang mempengaruhi minat pedagang pasar terhadap pinjaman rentenir, pada penelitian tersebut mengatakan bahwa banyak faktor yang mempengaruhi minat pedagang meminjam uang kepada rentenir. Faktor tersebut adalah faktor kemudahan dimana pedagang pasar tersebut merasa bahwa rentenir selalu memberikan kemudahan dalam memiliki modal dan tidak memberikan cukup syarat untuk pinjaman modal untuk usahanya, berbeda dengan bank dan koperasi yang dimana memiliki banyak persyaratan yang harus dipenuhi. Susah memenuhi persyaratan untuk meminjam uang kepada lembaga keuangan menjadi kendala pedagang untuk memutuskan meminjam uang kepada lembaga keuangan. Faktor yang lain yaitu faktor kenyamanan hal ini terjadi karena para pedagang sudah merasa nyaman dengan keberadaan rentenir dan sudah menganggap rentenir seperti saudara bahkan keluarga sendiri.

Bersarkan uraian diatas penulis menduga sementara bahwa inklusi keuangan pedagang di pasar Gamping masih rendah atau bahkan tidak punya. Maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS DETERMINASI TINGKAT INKLUSI KEUANGAN PEDAGANG TRADISIONAL DI PASAR GAMPING – YOGYAKARTA”

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis membatasi masalah yang akan di analisis dan dibahas diantaranya yaitu:

1. Memfokuskan pada objek yang menjadi sumber penelitian yaitu para pedagang yang berada di Pasar Gamping.
2. Variabel-variabel yang di pakai dalam melakukan penulisan yaitu inklusi keuangan sebagai variabel dependen dan variabel independennya menggunakan media sosial, promosi, persyaratan dan lokasi.

C. Rumusan Masalah

Untuk memperjelas permasalahan yang akan diteliti berdasarkan latar belakang tersebut, didapat beberapa rumusan masalah mengenai tingkat inklusi keuangan pada pedagang di pasar Gamping – Yogyakarta:

1. Apakah media sosial mempengaruhi tingkat inklusi keuangan pada pedagang tradisional di pasar Gamping!
2. Apakah promosi mempengaruhi tingkat inklusi keuangan pada pedagang tradisional di pasar Gamping!
3. Apakah persyaratan mempengaruhi tingkat inklusi keuangan pada pedagang tradisional di pasar Gamping!
4. Apakah lokasi mempengaruhi tingkat inklusi keuangan pada pedagang tradisional di pasar Gamping!

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui media sosial berpengaruh terhadap tingkat inklusi keuangan pada pelaku pedagang pasar tradisional dipasar Gamping.
2. Untuk mengetahui apakah promosi berpengaruh terhadap tingkat inklusi keuangan pada pelaku pedagang pasar tradisional dipasar Gamping.
3. Untuk mengetahui apakah persyaratan berpengaruh terhadap tingkat inklusi keuangan pada pelaku pedagang pasar tradisional dipasar Gamping.
4. Untuk mengetahui apakah lokasi berpengaruh terhadap tingkat inklusi keuangan pada pelaku pedagang pasar tradisional dipasar Gamping.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan pengaruh bagi :

1. Pelaku pedagang pasar tradisional, sebagai solusi meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terhadap keuangan atau melek keuangan terutama keuangan .
2. Pemerintah dan lembaga keuangan mikro terkait, sebagai referensi agar dapat lebih aktif dalam mengedukasi keuangan kepada pelaku pedagang pasar tradisional.

3. Para akademik sebagai referensi dalam mengkaji perkembangan inklusi keuangan pada penelitian selanjutnya

